

ABSTRAK

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan terkait upaya melakukan reorientasi masalah kewenangan OJK dan kepolisian dalam menjalankan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Disamping itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah terhadap masalah masalah kewenangan OJK dan Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan.

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktifisme. Model konstruktifisme diharapkan mampu menemukan bangunan dasar dari OJK dan Polri dalam menjalankan perannya. Pendekatan penelitian di jalankan melalui pendekatan hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan dan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).

Hasil penelitian menegaskan kehadiran OJK merupakan instrument hukum yang terbentuk tidak lain adalah untuk menciptakan keadilan. Melalui tujuan tersebut, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional. Sedangkan korelasinya fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna, bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama tugas dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban. Masalah kelemahan adalah terkait faktor budaya masyarakat yaitu intensitas masyarakat dalam keterlibatannya penegakan dan mendukung penyidikan akan terhambat dengan adanya ketidakjelasan kewenangan kelembagaan penyidik. Kewenangan OJK secara substantif harus diarahkan untuk membangun pola kredibilitas dalam menaungi kewenangan-kewenangan yang dimiliki yang kedepannya dapat mutlak mengakuisisi peran dari kepolisian dalam melakukan penyidikan dan kejaksaan dalam melakukan penuntutan Jangkauan kewenangan OJK tentunya bukan mengadopsi dan atau mengambil alih kewenangan Kepolisian dan kejaksaan, akan tetapi menempatkan posisinya sebagai lembaga yang memiliki otoritas independent dalam menunjang pemberantasan tindak pidana perbankan. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah Perlu memperkuat hubungan kelembagaan antara OJK dan Polri utamanya dalam mendukung fungsi penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Disamping itu hal yang tak kalah penting adalah kewenangan penyidik POLRI yang dijalankan melalui penyidikan kejahatan perbankan harus ditempatkan sebagai bagian dari memperjelas kewenangan yang dimiliki OJK dalam melaksanakan fungsi menjamin stabilitas keuangan Negara.

Kata Kunci : *rekonstruksi, kewenangan, OJK, kepolisian*

ABSTRACT

It is expected that the research conducted can be taken into consideration and input related to efforts to reorient the problem of the position of the OJK and the police in carrying out investigations into criminal acts of bankruptcy. In addition, the results of the research can be a recommendation for the government on the problem of the position of the OJK and the Police in investigating criminal acts of bankruptcy.

The method used in this study through the constructivism paradigm. The constructive model is expected to be able to find the basic building of the OJK and Polri in carrying out its role. The research approach is carried out through an empirical legal approach, namely legal research whose object of study includes provisions and implementation or implementation of legal provisions in action on every legal event that occurs in the community (in concreto). For data analysis used qualitative analysis.

The results of the study confirm that the presence of OJK is a legal instrument that is formed which is nothing but to create justice. Through these objectives, the OJK is expected to support the interests of the national financial services sector. While the correlation of the police function that carries one of the "functions of government" implies, that the government held by the President as the authority holder of government (executive) delegates some of his power to the police, especially the duties and authorities in the security and order sector. The problem of weakness is related to community cultural factors, namely the intensity of the community in their involvement in enforcement and supporting the investigation will be hampered by the lack of clarity of the investigator's institutional authority. The OJK authority must be directed substantively to build a pattern of credibility in overseeing the authority that is owned in the future that can absolutely acquire the role of the police in conducting investigations and prosecutors in prosecuting OJK's authority, of course, not adopting or taking over the authority of the police and prosecutors placing its position as an institution that has independent authority in supporting the eradication of criminal acts of banking.

The recommendations given based on the results of this study are necessary to strengthen institutional relations between the OJK and the National Police in supporting the function of investigations into banking crimes. Besides that, the important thing is that the authority of POLRI investigators carried out through investigation of banking crimes must be placed as part of clarifying the authority possessed by the OJK in carrying out the function of guaranteeing the stability of state finances.

Keywords: *reconstruction, authority, OJK, police*